# ANGGARAN PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMERATAAN AKSES DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Apricelly Gresya Lase
Universitas Negeri Semarang
Alamat e-mail : gresya0718@gmail.com

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the role of education budgets as an instrument for promoting equitable access and improving education quality in Indonesia. This research employed a Systematic Literature Review (SLR) based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. The review included 25 articles published between 2021 and 2026 addressing education financing policies, budget effectiveness, equitable access, financial governance, and education quality. The literature was analyzed through thematic categorization and synthesis of research findings. The results indicate that education budgets play a strategic role in supporting the availability of educational services. However, increased budget allocations do not automatically lead to equitable access or improved education quality. Financing effectiveness is influenced by the accuracy of budget distribution, the alignment of fund utilization with school needs, transparency, accountability, and evaluation of educational outcomes. Regarding equitable access, socioeconomic differences and varying regional needs are important considerations in developing education financing policies. Meanwhile, improving education quality requires budget utilization that prioritizes learning needs and the enhancement of educational services. This review emphasizes that budget policies should integrate equitable fund distribution, effective financial management, and improvements in service quality. Therefore, education financing evaluations should not focus solely on budget allocation and expenditure realization, but also on their contributions to educational access and quality. Future research is recommended to empirically examine the relationship between education budgets and educational outcomes.*

***Keywords**: Education Financing, Equitable Access, Education Quality, Systematic Literature Review.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggaran pendidikan sebagai instrumen pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Literatur yang dikaji terdiri atas 25 artikel yang diterbitkan pada periode 2021–2026 dan relevan dengan kebijakan pembiayaan pendidikan, efektivitas anggaran, pemerataan akses, tata kelola pembiayaan, serta kualitas pendidikan. Analisis dilakukan melalui pengelompokan tema dan sintesis temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa anggaran pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung ketersediaan layanan pendidikan, tetapi peningkatan alokasi dana tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan akses maupun

peningkatan kualitas. Efektivitas pembiayaan dipengaruhi oleh ketepatan distribusi anggaran, kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan satuan pendidikan, transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Pada aspek pemerataan, perbedaan kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan antardaerah menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan pembiayaan. Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan memerlukan pemanfaatan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan pembelajaran dan perbaikan layanan pendidikan. Kajian ini menegaskan bahwa kebijakan anggaran perlu mengintegrasikan pemerataan distribusi dana, efektivitas pengelolaan, dan peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, evaluasi pembiayaan pendidikan sebaiknya tidak hanya berfokus pada besaran alokasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga pada kontribusinya terhadap akses dan kualitas pendidikan. Penelitian selanjutnya disarankan menguji hubungan antara anggaran dan hasil pendidikan secara empiris.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Pendidikan, Pemerataan Akses, Kualitas Pendidikan, *Systematic Literature Review.*

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, kompetensi pendidik, dan proses pembelajaran, tetapi juga oleh ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya keuangan yang memadai. Dalam hal ini, anggaran pendidikan berperan penting dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi guru, peningkatan kualitas pembelajaran, serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. UNESCO melalui *Education 2030 Framework for Action* menekankan pentingnya pembiayaan pendidikan yang memadai, berkelanjutan, dan efektif untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Komitmen tersebut diperkuat dalam *Thematic Action Track 5 on Financing of Education Discussion Paper*, yang menyoroti mobilisasi sumber daya, pemerataan dan efisiensi pengeluaran, serta akuntabilitas pembiayaan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan keempat atau SDG 4 (UNESCO, 2022). Dengan demikian, anggaran pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Peningkatan anggaran belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan

pendidikan. Efektivitas pembiayaan juga ditentukan oleh ketepatan alokasi, pemerataan penerima manfaat, dan kontribusinya terhadap perbaikan layanan serta capaian belajar. UNESCO (2025) menegaskan bahwa penutupan kesenjangan pembiayaan memerlukan peningkatan sumber daya yang disertai pengelolaan pengeluaran secara efisien dan merata. Sejalan dengan hal tersebut, Lima et al. (2024), melalui tinjauan sistematis terhadap 45 dokumen penelitian, menemukan bahwa pengeluaran pendidikan dapat berkaitan dengan peningkatan prestasi akademik dan kemajuan pendidikan, meskipun hasilnya bergantung pada jenis intervensi dan konteks penerapannya. Kajian tersebut juga menunjukkan dominasi bukti dari negara maju, sehingga hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasikan ke negara berkembang. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan perlu dikaji dengan mempertimbangkan konteks kebijakan, pemerataan distribusi sumber daya, dan kebutuhan sistem pendidikan masing-masing negara.

Persoalan tersebut relevan bagi Indonesia, yang menjadikan pembiayaan sebagai salah satu instrumen utama pembangunan pendidikan. Berbagai kebijakan pendanaan diarahkan untuk memperluas partisipasi peserta didik, mendukung operasional satuan pendidikan, dan mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh layanan pendidikan. Namun, perluasan akses perlu diikuti peningkatan kualitas pembelajaran agar memberikan manfaat pendidikan yang bermakna. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa hanya 18% peserta didik Indonesia berusia 15 tahun mencapai setidaknya Level 2 dalam matematika, 25% dalam membaca, dan 34% dalam sains. Capaian tersebut berada di bawah rata-rata OECD pada ketiga bidang yang diukur (OECD, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas hasil belajar masih menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Meskipun demikian, capaian PISA tidak secara langsung membuktikan bahwa persoalan tersebut disebabkan oleh anggaran pendidikan, sebab hasil belajar juga dipengaruhi kualitas pengajaran, lingkungan belajar, dan kondisi sosial ekonomi peserta didik.

Pemerataan akses menjadi dimensi penting dalam memahami peran anggaran pendidikan. Pemerataan tidak cukup diukur melalui peningkatan jumlah peserta didik yang bersekolah, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesetaraan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Perbedaan kondisi geografis, sosial ekonomi, ketersediaan tenaga pendidik, dan fasilitas sekolah menyebabkan kebutuhan pembiayaan antardaerah maupun antarsatuan pendidikan tidak selalu sama. UNESCO (2022, 2025) menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan kebijakan pembiayaan yang memperhatikan kelompok serta wilayah yang kurang terlayani. Oleh karena itu, anggaran pendidikan perlu dinilai tidak hanya berdasarkan besarnya alokasi secara agregat, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menjangkau kelompok yang membutuhkan dan mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.

Kajian mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia telah dilakukan oleh Saputra et al. (2026) mengenai pembiayaan pendidikan, efisiensi, efektivitas, tata kelola, pemerataan, dan hasil pendidikan. Temuannya menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pengeluaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan praktik pengelolaan pendidikan. Pembiayaan berkontribusi terhadap perluasan akses dan partisipasi, sedangkan peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan hasil pendidikan masih menghadapi tantangan. Temuan tersebut menjadi landasan penting bagi kajian ini. Namun, penelitian yang diusulkan memiliki fokus lebih spesifik, yaitu menelaah anggaran pendidikan sebagai instrumen kebijakan yang menghubungkan pemerataan akses dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan sintesis literatur yang mengintegrasikan anggaran pendidikan, pemerataan akses, dan kualitas pendidikan dalam konteks Indonesia. Kajian terdahulu telah membahas efisiensi pembiayaan, efektivitas pengeluaran, pemerataan sumber daya, dan hasil belajar, tetapi masih menunjukkan keragaman fokus serta konteks analisis. Oleh karena itu, diperlukan kajian sistematis untuk

mengidentifikasi pola temuan, perbedaan hasil penelitian, serta faktor yang memengaruhi kontribusi anggaran terhadap pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas pendidikan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran anggaran pendidikan sebagai instrumen pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review.* Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi pola alokasi dan pemanfaatan anggaran pendidikan, mengkaji keterkaitannya dengan pemerataan akses, serta menganalisis kontribusinya terhadap kualitas pendidikan berdasarkan penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis konseptual yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis dengan menempatkan pemerataan akses sebagai dimensi penting dalam memahami hubungan antara anggaran dan kualitas pendidikan.

Hasil penelitian diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian pembiayaan pendidikan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan anggaran yang lebih berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji anggaran pendidikan sebagai instrumen pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Proses kajian mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for *Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 yang digunakan untuk mendokumentasikan tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penetapan artikel yang relevan (Page et al., 2021).

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Scopus, ERIC, dan Garuda, serta publikasi dari lembaga terkait, seperti UNESCO, OECD, dan *World Bank.* Kata kunci yang digunakan meliputi *education budget, education financing, education expenditure, equity in education, access to education, education quality*, anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pemerataan akses

pendidikan, dan kualitas pendidikan. Penelusuran difokuskan pada publikasi tahun 2021–2026 yang membahas pembiayaan pendidikan, pemerataan akses, atau kualitas pendidikan, khususnya dalam konteks Indonesia.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup artikel yang relevan dengan kebijakan atau alokasi anggaran pendidikan, pemerataan akses pendidikan, kualitas pendidikan, serta hubungan pembiayaan dengan hasil pendidikan di Indonesia. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel duplikat, publikasi yang tidak sesuai dengan fokus penelitian, dan artikel yang tidak menyediakan informasi memadai untuk dianalisis.

Untuk memastikan proses seleksi berlangsung secara sistematis dan transparan, tahapan penelusuran dan pemilihan artikel disajikan dalam diagram alir PRISMA 2020 pada Gambar 1. Diagram tersebut menggambarkan jumlah artikel yang ditemukan pada tahap identifikasi, artikel yang dihapus karena duplikasi, artikel yang diseleksi berdasarkan judul dan abstrak, artikel yang diperiksa melalui teks lengkap, serta artikel yang akhirnya memenuhi kriteria untuk dianalisis.

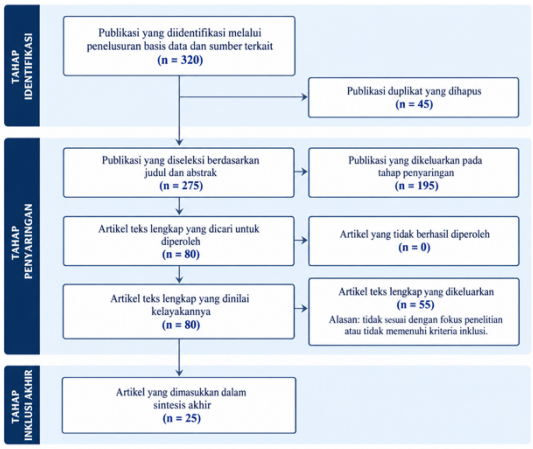


**Gambar 1. Diagram Alir PRISMA**

Berdasarkan tahapan pada Gambar 1, artikel yang memenuhi kriteria inklusi selanjutnya dianalisis menggunakan sintesis tematik. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema utama, yaitu kebijakan dan penggunaan anggaran pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta kontribusi pembiayaan terhadap kualitas pendidikan. Hasil pengelompokan tersebut kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi pola temuan, keterkaitan antartema, dan kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya

## C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Hasil Seleksi Literatur*

Berdasarkan proses penelusuran dan seleksi literatur dengan

pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), diperoleh 25 artikel yang relevan dengan fokus penelitian mengenai anggaran pendidikan sebagai instrumen pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Artikel yang dianalisis diterbitkan pada periode 2021–2026 dan mencakup penelitian empiris maupun kajian literatur mengenai kebijakan pembiayaan, bantuan operasional sekolah, pemerataan akses, tata kelola anggaran, serta kualitas pendidikan.

Seluruh artikel kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus kajian dan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengelompokan tersebut disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pengelompokkan Literatur Berdasarkan Indikator Kajian**

| Indikator | Fokus Analisis |
|---|---|
| Kebijakan pembiayaan | Sumber, standar, dan alokasi anggaran pendidikan |
| Efektivitas anggaran | Pelaksanaan program dan hasil pemanfaatan dana |
| Pemerataan akses | Distribusi pendanaan dan kesenjangan akses pendidikan |
| Tata kelola anggaran | Perencanaan, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas |
| Kualitas pendidikan | Mutu layanan, kinerja guru, dan hasil belajar |
| Hambatan pembiayaan | Kenaikan biaya, keterbatasan dana, dan efisiensi anggaran |

### *Sintesis Temuan Literatur*

Hasil sintesis terhadap 25 artikel menghasilkan enam tema utama yang menggambarkan keterkaitan antara kebijakan anggaran, pemerataan akses, tata kelola pembiayaan, dan kualitas pendidikan. Ringkasan temuan serta literatur pendukungnya disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Sintesis Temuan Utama Literatur**

| Tema | Temuan Utama | Literatur Pendukung |
|---|---|---|
| Kebijakan pembiayaan | Pembiayaan membutuhkan standar, alokasi, dan sumber pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. | Maharani et al. (2024); Husna et al. (2024); Asiah (2023); Fatmariyanti et al. (2023); Ulandari et al. (2022); Sumiyana dan Effendi (2024); Sofyan et al. (2021). |
| Efektivitas anggaran | Dampak dana BOS perlu dinilai berdasarkan indikator akses, kinerja sekolah, dan hasil pendidikan. | Sitanggang dan Jasmina (2023); Susanto dan Suhartono (2022); Doringin et al. (2023); Sumilat (2022); Gojali (2022); Madjid et al. (2021). |
| Pemerataan akses | Distribusi pendanaan dan kondisi sosial ekonomi berkaitan dengan kesenjangan akses pendidikan. | Wirandana dan Khoirunurrofik (2024); Sinta dan Iqbal (2023); Fadhila dan Riani (2024); Arsal dan Hidayat (2024); Lestary et al. (2026). |
| Tata kelola anggaran | Transparansi, perencanaan, dan | Waluyo et al. (2023); Ananda et al. (2025); |

| | | |
|---|---|---|
| | akuntabilitas diperlukan untuk mendukung penggunaan dana yang tepat sasaran. | Restarie et al. (2025); Wardhani et al. (2022); Sumiyana dan Effendi (2024); Fatmariyanti et al. (2023). |
| Kualitas pendidikan | Hubungan anggaran dengan kualitas perlu dilihat melalui pemanfaatan dana dan hasil layanan pendidikan. | Lima et al. (2024); Susanto dan Suhartono (2022); Doringin et al. (2023); Sumilat (2022); Gojali (2022); Wardhani et al. (2022); Lumowa et al. (2021); Lestary et al. (2026). |
| Hambatan pembiayaan | Kenaikan biaya, desentralisasi, dan efisiensi anggaran menjadi persoalan dalam keberlanjutan layanan pendidikan. | Fadhila dan Riani (2024); Arsal dan Hidayat (2024); Sabrina dan Effane (2022); Asiah (2023); Restarie et al. (2025); Ananda et al. (2025); Lumowa et al. (2021). |

**1. Anggaran Pendidikan dan Tantangan Pemerataan Akses**

Anggaran pendidikan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Melalui alokasi dan distribusi pendanaan, pemerintah berupaya memastikan bahwa satuan pendidikan memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran. Namun, ketersediaan anggaran belum tentu secara langsung menghasilkan pemerataan akses. Efektivitas kebijakan tersebut turut ditentukan oleh ketepatan distribusi dana, karakteristik wilayah, serta kemampuan masyarakat dalam menjangkau layanan pendidikan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa pemerataan anggaran dan pemerataan akses merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya identik. Distribusi dana yang lebih merata belum tentu menghilangkan kesenjangan apabila daerah tertentu menghadapi keterbatasan sarana pendidikan, kondisi geografis yang sulit, atau hambatan sosial ekonomi. Dalam konteks Indonesia, mekanisme transfer fiskal antarpemerintah menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki kebutuhan dan kapasitas yang berbeda dalam penyelenggaraan pendidikan. Kajian Wirandana dan Khoirunurrofik (2024) mengenai efektivitas transfer fiskal dalam mengurangi kesenjangan pendidikan memperkuat relevansi persoalan distribusi pendanaan dalam upaya pemerataan.

Pada tingkat satuan pendidikan, bantuan operasional sekolah juga menjadi salah satu instrumen untuk mendukung akses masyarakat. Meskipun demikian, dampaknya terhadap partisipasi pendidikan perlu dilihat berdasarkan hasil empiris. Sitanggang dan Jasmina (2023), misalnya, menemukan bahwa dana BOS SMA/SMK tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan angka partisipasi murni selama periode penelitian mereka. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa bantuan operasional saja belum tentu cukup untuk menghasilkan perubahan pada indikator partisipasi. Hasil ini tidak berarti bahwa BOS tidak bermanfaat, tetapi menunjukkan perlunya memperhatikan faktor lain yang turut memengaruhi akses pendidikan.

Keterjangkauan biaya juga menjadi bagian penting dalam persoalan pemerataan. Ketika biaya pendidikan meningkat, kelompok masyarakat dengan sumber daya ekonomi terbatas berpotensi menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan. Pembahasan mengenai problematika pembiayaan dan kenaikan biaya pendidikan oleh Fadhila dan Riani (2024) serta Arsal dan Hidayat (2024) relevan untuk memahami bahwa akses pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sekolah dan anggaran pemerintah, tetapi juga oleh beban biaya yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, Sinta dan Iqbal (2023) menyoroti kesenjangan sosial dalam mengakses pendidikan, yang memberikan perspektif tambahan mengenai dimensi sosial dari pemerataan.

Pemerataan akses pendidikan memerlukan kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antardaerah dan antarkelompok masyarakat. Alokasi anggaran perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan administratif, tetapi juga pada pengurangan hambatan yang menyebabkan masyarakat sulit memperoleh layanan pendidikan.

**2. Efektivitas Pengelolaan Anggaran dalam Mendukung Kulitas Pendidikan**

Hubungan antara pengeluaran sekolah dan hasil pendidikan menjadi salah satu dasar penting dalam memahami persoalan

tersebut. Lima et al. (2024) mengkaji hubungan pengeluaran sekolah dengan hasil pendidikan melalui tinjauan literatur sistematis.

Kajian ini menempatkan pembiayaan sebagai aspek yang perlu dianalisis bersama hasil yang dicapai. Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai dana BOS juga mencakup berbagai indikator, seperti kinerja guru, motivasi belajar, performa peserta didik, dan kualitas sekolah (Susanto dan Suhartono, 2022; Sumilat, 2022; Doringin et al., 2023; Gojali, 2022). Keragaman indikator tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan merupakan konsep yang multidimensional. Perbaikan pada satu aspek belum tentu secara otomatis mencerminkan peningkatan pada aspek lainnya. Dana yang membantu memenuhi kebutuhan operasional sekolah, misalnya, perlu dinilai lebih lanjut berdasarkan kontribusinya terhadap proses pembelajaran dan hasil pendidikan.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan perencanaan pembiayaan. Sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda berdasarkan kondisi sarana, jumlah peserta didik, ketersediaan tenaga pendidik, dan karakteristik lingkungan. Penganggaran yang tidak mempertimbangkan perbedaan tersebut berisiko menghasilkan penggunaan dana yang kurang optimal. Sumiyana dan Effendi (2024) menyoroti persoalan adaptivitas sistem penganggaran pendidikan Indonesia, sedangkan Maharani et al. (2024) dan Husna et al. (2024) membahas sumber, jenis, serta standar pembiayaan pendidikan. Ketiga kajian tersebut relevan dalam menempatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan sebagai bagian dari efektivitas pembiayaan.

Anggaran pendidikan akan lebih bermakna apabila dirancang berdasarkan kebutuhan nyata satuan pendidikan dan dievaluasi menggunakan indikator yang sesuai. Efektivitas pembiayaan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan menghabiskan dana sesuai rencana, tetapi juga dengan sejauh mana penggunaan dana mendukung proses pembelajaran dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

**3. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan**

Efektivitas anggaran tidak dapat dipisahkan dari tata kelola pembiayaan. Perencanaan yang tepat perlu disertai pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa mekanisme tersebut, anggaran berisiko tidak digunakan sesuai prioritas atau tidak memberikan manfaat yang optimal bagi satuan pendidikan.

Dalam pengelolaan dana BOS, transparansi diperlukan agar proses penggunaan dana dapat diketahui dan ditelusuri oleh pihak yang berkepentingan. Waluyo et al. (2023) mengkaji transparansi penggunaan dana BOS pada sekolah dasar Islam terpadu Muhammadiyah, sedangkan Ananda et al. (2025) membahas persoalan pembiayaan pendidikan dasar, termasuk distribusi dana, efisiensi, dan transparansi. Kajian tersebut relevan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tidak hanya mengikuti prosedur administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan dan tujuan penggunaannya.

Di sisi lain, manajemen pembiayaan memerlukan keterkaitan antara perencanaan anggaran dan peningkatan mutu pendidikan. Wardhani et al. (2022) menempatkan manajemen pembiayaan dalam konteks peningkatan mutu, sementara Fatmariyanti et al. (2023) membahas konsep, landasan hukum, dan model pengelolaan pembiayaan pendidikan. Sofyan et al. (2021) juga mengkaji pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah menengah. Secara bersama-sama, literatur tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa pengelolaan pembiayaan melibatkan rangkaian proses yang saling berhubungan, mulai dari penentuan kebutuhan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Tata kelola yang baik juga perlu didukung oleh sistem penganggaran yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pendidikan. Persoalan adaptivitas yang dibahas Sumiyana dan Effendi (2024) menunjukkan relevansi penyesuaian sistem

penganggaran terhadap kondisi satuan pendidikan. Dalam konteks perubahan kebijakan, Restarie et al. (2025) membahas strategi tata kelola pembiayaan pendidikan setelah efisiensi anggaran. Hal ini memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan prioritas layanan pendidikan ketika pemerintah atau satuan pendidikan harus menyesuaikan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan berbasis kebutuhan perlu dipandang sebagai satu kesatuan dalam tata kelola anggaran. Transparansi memungkinkan penggunaan dana ditelusuri, akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban, sedangkan perencanaan berbasis kebutuhan membantu mengarahkan anggaran pada prioritas yang relevan. Ketiganya diperlukan agar efektivitas pembiayaan tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari manfaatnya terhadap penyelenggaraan pendidikan.

**4. Tantangan Pembiayaan dan Keberlanjutan Layanan Pendidikan**

Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kemampuan sistem pembiayaan dalam menghadapi berbagai keterbatasan. Tantangan tersebut mencakup kenaikan biaya pendidikan, perbedaan kapasitas pendanaan, pembagian tanggung jawab antarpihak, serta kebutuhan melakukan efisiensi anggaran. Persoalan ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan dana, tetapi juga dengan bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan.

Kenaikan biaya pendidikan dapat meningkatkan beban pembiayaan bagi masyarakat maupun satuan pendidikan. Arsal dan Hidayat (2024) membahas persoalan kenaikan biaya pendidikan, sedangkan Fadhila dan Riani (2024) mengkaji berbagai problematika pembiayaan, termasuk kesenjangan akses dan efektivitas anggaran. Dalam situasi tersebut, kebijakan pembiayaan perlu mempertimbangkan keterjangkauan layanan agar

keterbatasan ekonomi tidak semakin memperbesar kesenjangan akses.

Selain persoalan biaya, pembiayaan pendidikan melibatkan pembagian tanggung jawab di antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Asiah (2023) membahas tanggung jawab para pihak dalam pembiayaan pendidikan, sedangkan Sabrina dan Effane (2022) menyoroti desentralisasi manajemen pembiayaan dan persoalan mahalnya biaya pendidikan. Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan melibatkan aspek kelembagaan dan koordinasi, sehingga pengelolaan pendanaan perlu didukung pembagian peran yang jelas.

Tantangan lainnya muncul ketika efisiensi anggaran menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan. Efisiensi pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara tepat, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan kebutuhan dasar satuan pendidikan. Pengurangan atau penyesuaian pengeluaran yang tidak didasarkan pada prioritas dapat berisiko mengganggu pemenuhan kebutuhan layanan. Karena itu, efisiensi sebaiknya dipahami sebagai upaya meningkatkan ketepatan penggunaan dana, bukan semata-mata mengurangi jumlah pengeluaran.

Dalam kaitan ini, Restarie et al. (2025) membahas strategi tata kelola pembiayaan pendidikan setelah efisiensi anggaran, sedangkan Ananda et al. (2025) menyoroti persoalan pembiayaan pendidikan dasar. Kajian Lumowa et al. (2021) mengenai peran pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar pada masa pandemi juga memberikan konteks mengenai pentingnya peran pemerintah dalam merespons kebutuhan layanan pendidikan. Meskipun fokus penelitian tersebut tidak seluruhnya terletak pada anggaran, kajian-kajian ini membantu menempatkan pembiayaan dalam konteks keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian, tantangan pembiayaan perlu ditangani melalui kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi,

keterjangkauan, dan kualitas layanan. Perencanaan berbasis kebutuhan, penentuan prioritas yang jelas, serta evaluasi terhadap dampak penggunaan dana menjadi penting agar keterbatasan sumber daya tidak mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak.

Berdasarkan sintesis literatur, peran anggaran pendidikan dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas tidak dapat dijelaskan hanya melalui besarnya alokasi dana. Anggaran bekerja melalui beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu distribusi pendanaan, pelaksanaan program, tata kelola, dan pemanfaatan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Kelemahan pada salah satu aspek dapat membatasi hasil yang diharapkan, meskipun pendanaan telah tersedia.

Pada dimensi pemerataan, distribusi dana perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan wilayah dan hambatan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pada dimensi kualitas, pemanfaatan anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan pembelajaran dan dievaluasi berdasarkan indikator hasil yang sesuai. Sementara itu, tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi penghubung antara ketersediaan dana dan manfaat yang dihasilkan. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan dan kualitas tidak seharusnya diperlakukan sebagai tujuan yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang saling mendukung.

Salah satu hal penting yang muncul dari literatur adalah bahwa peningkatan alokasi anggaran tidak otomatis menghasilkan pemerataan akses atau peningkatan kualitas pendidikan. Temuan Sitanggang dan Jasmina (2023) mengenai tidak signifikannya pengaruh BOS terhadap perubahan angka partisipasi murni menjadi contoh bahwa hubungan antara pendanaan dan hasil pendidikan perlu diuji berdasarkan indikator yang jelas. Sementara itu, kajian mengenai pengeluaran sekolah dan hasil pendidikan oleh Lima et al. (2024) memperkuat relevansi penilaian pembiayaan berdasarkan hasil, bukan semata-mata input.

Implikasinya, evaluasi kebijakan anggaran pendidikan perlu menghubungkan tiga aspek utama:

kecukupan dan distribusi dana, kualitas pengelolaan, serta hasil yang dicapai dalam akses dan layanan pendidikan. Pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah dan satuan pendidikan menilai apakah anggaran telah diarahkan pada kebutuhan yang tepat dan apakah penggunaannya mendukung tujuan pendidikan secara berkelanjutan.

**D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 25 artikel yang diterbitkan pada periode 2021–2026, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilan pembiayaan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh ketepatan distribusi dana, efektivitas penggunaannya, serta kualitas tata kelola pembiayaan.

Dalam aspek pemerataan akses, kebijakan pembiayaan perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial ekonomi, kebutuhan satuan pendidikan, dan kesenjangan antardaerah. Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan didukung evaluasi berdasarkan indikator hasil yang jelas. Transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan berbasis kebutuhan juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara tepat sasaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ananda, R., dkk. (2025). Pembiayaan pendidikan dasar dan permasalahannya. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,* 10(2). https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24895

Arsal, F. R., & Hidayat, A. (2024). Masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia: Kenaikan biaya pendidikan. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 5(1), 1–12. https://doi.org/10.51178/invention.v5i1.1648

Asiah, D. (2023). Tanggung jawab pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara,* 1(1), 68–75. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i1.113

Doringin, F., Silaban, S., Pangalila, T., & Sasia, K. (2023). The impact of school operational assistance funds on students' performance in Jakarta. *Technium Social Sciences Journal*, 49(1), 338–344. https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9823

Fadhila, N., & Riani, L. P. (2024). Menelisik problematika pembiayaan pendidikan di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Prosiding Pendidikan Ekonomi.* https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/PROSPEK/article/view/5905

Fatmariyanti, Y., Zohriah, A., & Bachtiar, M. (2023). Manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan: Konsep, landasan hukum, dan model. *INDOPEDIA: Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan*, 1(2), 443–451. https://indopediajurnal.my.id/index.php/jurnal/article/view/51

Gojali, T. (2022). Analisis peningkatan kualitas sekolah dengan adanya bantuan dana BOS. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia,* 7(10). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.9635

Husna, A., Alayda, N., Mardianti, A., Ananda, R., & Nasrul. (2024). Analisis standar pembiayaan pendidikan dasar. Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,* 9(2). https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.14312

Lestary, F. T., Harsono, Sukasno, & Suyatmini. (2026). Analisis kebijakan pembiayaan pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Karanganyar: Dampaknya terhadap akses dan mutu. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar.* https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.40600

Lima, R., Sampaio, L. M. B., & Sampaio, R. M. B. (2024). Relationship between school expenditure and educational outcomes: A systematic literature review. *Education Policy Analysis Archives,* 32. https://doi.org/10.14507/epaa.32.8680

Lumowa, F., Nayoan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar pada masa pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36258

Madjid, U., Nurrahman, A., Wahyuni, N., dkk. (2021). Implementasi program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat pendidikan dasar pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja,* 11(1), 65–84. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1989

Maharani, N. A., Hidayah, F., Darmawan, D., & Trihantoyo, S. (2024). Analisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39. https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3004

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: *An updated guideline for reporting*

*systematic reviews.* BMJ, 372, n71.

Restarie, M. D., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Strategi tata kelola pembiayaan pendidikan usai efisiensi anggaran: Systematic literature review. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,* 10(2). https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.27432

Sabrina, N., & Effane, A. (2022). Desentralisasi manajemen pembiayaan dan konflik dalam mahalnya biaya pendidikan. *Karimah Tauhid,* 1(1), 84–89. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i1.7715

Saputra, R. C., Aminudin, M. R., Harmami, Sugiyanto, Harsono, & Suyatmini. (2026). A systematic literature review of education financing culture in Indonesia: Examining efficiency, effectiveness, and educational outcomes and impacts. *Buletin Literasi Budaya Sekolah,* 8(1). https://doi.org/10.23917/blbs.v8i1.17196

Sinta, T. Della, & Iqbal, M. (2023). Kesenjangan sosial dalam mengakses pendidikan di Bengkulu. *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial,* 8(1), 1–18. https://doi.org/10.37216/tarbawi.v8i1.847

Sitanggang, D. A., & Jasmina, T. (2023). Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 8(4), 307–320. https://doi.org/10.33105/itrev.v8i4.656

Sofyan, Y., Ahmadi, E., & Barlian, U. C. (2021). Analisis pembiayaan pendidikan (suatu kajian praktis dalam pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah menengah umum). *Jurnal Ilmiah MEA,* 5(1), 221–239. https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.791

Sumilat, M. (2022). Pengaruh Dana BOS terhadap motivasi belajar siswa SD se-Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 109–114. https://doi.org/10.5281/zenodo.7323013

Sumiyana, S., & Effendi, R. (2024). Indonesia's education budgeting system denoting low adaptiveness: Functionalism analysis. *Cogent Social Sciences,* 10(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2393870

Susanto, T., & Suhartono. (2022). The effectiveness of school operational assistance program implementation in improving teacher performance and education quality in elementary schools. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh,* 23(1), 20–29. https://doi.org/10.33830/ptjj.v23i1.3228.2022

Ulandari, L. U., Ridha, A. R., Rozalita, D. R., Ananda, R. A., & Witarsa, R. W. (2022). Analisis kebijakan standar pembiayaan pendidikan guru sekolah dasar. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 6(3), 584–590. https://doi.org/10.26858/jkp.v6i3.35114

Waluyo, T., Harsono, & Suyatmini. (2023). Transparansi penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Islam Terpadu

Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316

Wardhani, A. S., Abdullah, G., & Miyono, N. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. *Journal Prakarsa Paedagogia*, 5(2). https://doi.org/10.24176/jpp.v5i2.8003

Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik, K. (2024). Educational inequality in Indonesia: Are intergovernmental fiscal transfers effective in reducing the gap? Educational Studies, 50(6), 1424–1443. https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2103647